



PERSPEKTIF FEMINISME *STANDPOINT* PADA PERJUANGAN PEREMPUAN PALESTINA TERHADAP SIKAP DISKRIMINATIF TENTARA ISRAEL DALAM KONFLIK ISRAEL – PALESTINA

Yovanka Ayunita D L, Mohamad Rosyidin, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

ABSTRACT

Awareness of women's rights is very low in Palestine. Most of the Palestinian women have lost their basic rights because of the ongoing Israeli-Palestinian conflict. Israel's security policies have harmed women including imposing restrictions on free movement, demolition of houses, and carrying out torture during interrogation. this issue creates a feeling of insecurity for Palestinian women. This encourages Palestinian women to carry out resistance movements. Therefore, the author's research aims to find out how the struggle of Palestinian women against the discriminatory actions of the Israeli army by analyzing using standpoint feminism theory and the concept of gender which is in line with women's rights. Based on the results of this study, the authors found a discussion that revealed that the Palestinian women's movement is a response to all forms of discrimination committed against Palestinian women by Israeli soldiers with the aim of liberating Palestine from Israeli rule so that they can regain their rights that have been deprived of them.

Keywords: *Israel, Palestine, Women's Movement, Women's Right, Standpoint Feminism.*

PENDAHULUAN

Tindakan deskriminatif tentara Israel mempengaruhi hak-hak perempuan Palestina. Pemerintah Israel terus memperkuat penjagaannya di perbatasan area yang disengketakan oleh Israel dan Palestina. Israel telah memberlakukan kebijakan yang harus ditaati oleh masyarakat Palestina khususnya perempuan (Amnesty International, 2005, p. 3). Kebijakan Israel kepada palestina adalah sebagai berikut.

Pertama, Pembatasan kebebasan bergerak. Dikatakan bahwa karena pembatasan pergerakan bebas, perempuan mengalami kesulitan tertentu yang menimbulkan risiko khusus untuk ibu hamil, pelajar perempuan dan pekerja, yang menyebabkan hilangnya hak mereka atas kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak dan standar hidup yang memadai. Perempuan Palestina lebih rentan terhadap tindakan yang diberlakukan di pos pemeriksaan dan kekerasan fisik (United Nations Conference on Trade and Development, 2014).

Kedua, perempuan palestina yang ingin menikah dengan laki-laki dari Gaza atau Tepi Barat tidak dapat mendapatkan surat serikat/perkawinan. Pada tahun 1997, setelah pasangan memenangkan permohonan reunifikasi keluarga, Kementerian Dalam Negeri memiliki kesempatan untuk memberikan status penduduk tetap kepada pasangan mereka dari wilayah pendudukan. Namun, status kependudukan permanen hanya bisa diberikan setelah lima tahun pertama menunggu permohonan diproses dan masa tunggu lima tahun berikutnya. Proses yang disebut "reuni keluarga" ini berdampak serius pada kehidupan keluarga karena

merampas hak warga Palestina untuk tinggal di Israel atau Yerusalem bersama pasangan atau anak-anak mereka. Jika perempuan Palestina yang tinggal di Yerusalem bercerai atau suaminya menikah lagi, mereka akan kehilangan hak tinggal mereka. Jika anak-anak mereka tinggal bersama ayah mereka, ibu mereka tidak akan diizinkan lagi untuk tinggal di kota yang sama dengan mereka, dan mereka bahkan tidak akan diizinkan untuk berkunjung (MIFTAH, 2017).

Ketiga, sejak 1967, otoritas sipil dan militer Israel telah menghancurkan lebih dari 48.000 rumah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur (Aaliyah, 2017). Penghancuran rumah Palestina mempengaruhi pria, wanita dan anak-anak. Ketika seorang wanita Palestina kehilangan rumahnya, dia kehilangan pusatnya dan identitasnya sebagai seorang istri dan ibu. Tinggal bersama kerabat untuk waktu yang lama menyebabkan tekanan pada pernikahan dan keluarga. Ketika kontrol perempuan atas ruang keluarga menghilang, tekanan mereka akan meningkat (United Nations, 2019, p. 10).

Keempat, tahanan perempuan Palestina secara rutin disiksa dan dianiaya oleh GGS (*General Security Service*) selama interogasi. Kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik langsung, seperti memukul, menampar, menendang, menempatkan seseorang pada postur yang menyakitkan, mengutuk, menghina, mengancam orang lain, dan membuat tahanan terkena panas atau dingin yang ekstrim. Selain kekerasan fisik, ada metode tambahan lainnya seperti isolasi dalam kondisi non-manusia, kerahasiaan dan pemenjaraan (Ginbar, 2003, p. 88). Beberapa wanita ditangkap, diancam dan diperlakukan dengan buruk untuk menekan suami mereka atau kerabat lainnya yang mungkin dicari atau diinterogasi Israel. Pasal 76 Konvensi Jenewa Keempat diatur bahwa, 'perempuan akan dikurung di tempat terpisah dan akan berada di bawah pengawasan langsung perempuan' (International Commitee of the Red Cross, 1949).

Konflik berkepanjangan antara Israel – Palestina telah mengancam keamanan perempuan-perempuan Palestina, seperti kekacauan Palestina yang mengancam akses ke perawatan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Berbagai keadaan telah menyebabkan penindasan terhadap perempuan Palestina. Adanya penindasan tersebut dan tidak adanya kemajuan dalam konflik antara Palestina dan Israel menjadi alasan mengapa perempuan Palestina akhirnya memutuskan untuk melakukan gerakan-gerakan yang berujung pada perlawanan terhadap Israel.

Penelitian sebelumnya mengenai topik serupa dilakukan oleh Imbolon (2018) yang mendeskripsikan konflik Israel-Palestina dan perjalanan hidup Leila Khalid dan perjuangannya bersama PFLP (*Popular Front for the Liberation of Palestine*) sebagai ikon pahlawan perempuan dalam melawan penjajahan Israel dengan menggunakan teori feminisme liberal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Leila Khaled merupakan wujud kesetaraan gender. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang dampak pendudukan Israel melalui diskriminasi yang dilakukan tentara Israel kepada Perempuan Palestina. Oleh karena itu, penelitian ini tidak membahas kehidupan spesifik dari ikon pahlawan wanita tetapi semua perempuan Palestina dimana hasil penelitian ini merupakan perjuangan perempuan dalam menembus batas-batas patriarki dengan menggunakan teori feminisme *standpoint* yang berbeda dengan teori yang digunakan oleh Imbolon.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nurbayati (2013) yang membahas hak-hak perempuan Palestina yang semakin terlihat dari waktu ke waktu dan karenanya perempuan Palestina melakukan gerakan perlawanan tanpa kekerasan terhadap Israel dengan berbagai cara dalam konflik Israel-Palestina untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam perjuangan nasional dengan menggunakan teori konstruktivisme. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas dampak pendudukan Israel melalui diskriminasi yang secara langsung dilakukan oleh tentara Israel kepada Perempuan Palestina, yang akhirnya

akan mengarah pada perjuangan perempuan Palestina untuk melampaui patriarki, karena dalam penelitian ini hak-hak perempuan dan kesetaraan gender belum terlihat.

Penelitian terakhir dilakukan oleh McKenna (2014-2015) yang membahas dampak pendudukan Israel terhadap hak-hak perempuan seperti pergerakan bebas, pembongkaran rumah, *honor killing*, pembersatuan keluarga, dll. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada hasil akhir dari kasus ini. Hasil penelitian McKenna menunjukkan bagaimana hak asasi manusia dilanggar akibat pendudukan militer Israel dan undang-undang Palestina yang diskriminatif serta penegakan hukum yang seharusnya dilakukan. Sementara perbedaannya dalam penelitian ini yaitu penelitian ini tidak membahas mengenai hukum Palestina yang diskriminatif, namun akan lebih membahas mengenai perjuangan perempuan Palestina dalam memerangi sikap diskriminatif antara Israel dengan menggunakan teori feminisme *standpoint* yang belum dibahas dalam tulisan McKenna.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah dijelaskan diatas, penelitian ini nantinya akan membahas tentang penyebab munculnya suara perempuan dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana kaum perempuan Palestina terlibat dalam proses perlawanan terhadap sikap Israel pada Intifada pertama. Penelitian ini juga ditujukan untuk memberikan pandangan lain dengan menggunakan teori feminisme *standpoint* dalam menganalisis perjuangan perempuan palestina dimana *standpoint* melihat kebenaran dari kaca mata pengalaman perempuan.

Teori kritis feminisme yang berpusat pada pembentukan kebenaran (*production of knowledge*) dan praktek kekuasaan (*practices of power*) (Harding, 2004, p. 1). Feminisme *standpoint* meyakini bahwa semua pengetahuan mencerminkan kepentingan dan nilai-nilai kelompok tertentu dan konstruksinya dipengaruhi oleh latar sosial, politik, ideologis, dan sejarah (Tickner J. A., 2001, p. 17). *Standpoint* menjelaskan bagaimana sudut pandang perempuan yang selama ini termaginalkan menjadi bahasan utama serta kegiatan utama dalam perkembangan gerakan feminisme. *Standpoint* mengandaikan adanya kekhususan dan pentingnya satu situasi, yaitu situasi yang hanya dapat dialami oleh perempuan sebelum perempuann merasakannya, sedangkan laki-laki tidak pernah mengalaminya. Menurut pandangan ini, para ahli feminis *standpoint* percaya bahwa perempuan dirugikan dan laki-laki mendapat banyak keuntungan, dan perbedaan gender berdampak besar (Griffin, 1991, p. 471).

Penulis menggunakan perspektif feminisme *standpoint* berdasarkan perspektif Cynthia Cockburn yang menggabungkan beberapa pemikir dengan fokus yang sama di antaranya Nancy Hartsock, Donna Haraway, Patricia Hill Collins, Sandra Harding dan Dorothy Edith Smith. Selain itu pandangan feminisme *standpoint* Cynthia Cockburn sangat erat kaitannya dengan hubungan internasional, dan dia adalah seorang peneliti di bidang gender, perang dan perdamaian.

Pengkaji feminisme *standpoint* Donna Haraway menjelaskan bahwa kebenaran dapat dilihat lebih dari satu posisi, yang mengembangkan konsep '*situated knowledge*' (Haraway, 1988, p. 575). Dalam hal ini Cockburn menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman, semakin besar kemungkinan untuk menjelaskan kebenaran yang bersifat '*unlocatable*'. Pandangan yang beragam dari kelas 'bawah' sangat berakar dari pengalaman hidup yang nyata dan dapat menjadi ukuran yang akuntabel (Cockburn, 2015, p. 331-346). Pengkaji feminisme *standpoint* melihat bahwa kebenaran tidak pernah *value free*. Dalam hal ini, Cockburn menekankan pada '*stronger vision of objectivity*' dimana kebenaran objektif akan lebih kuat apabila digabungkan dengan '*standpoint from below*' dengan penyelidikan yang refleksif. Subjek yang di sarankan oleh Cockburn berasal dari kelompok yang termarjinal, bebas dari kekuasaan, dan informatif terhadap kebenaran yang bersangkutan (Cockburn, 2015, p. 331-346). Rosyidin (2020) menyatakan bahwa feminisme *standpoint* akan melihat dari pengalaman perempuan dan sudut pandang perempuan dalam memahami fenomena yang terjadi.

Feminisme *standpoint* memberi ruang bagi korban untuk berbicara dari sudut pandangnya sendiri (Rosyidin, 2020, p. 201).

Pelopop Sandra Harding, Dorothy Edith Smith, Susan Jean Hekman, dan Nancy Hartsock menemukan teori *standpoint* dari perspektif Marxis yang menyetujui bahwa adanya kelas-kelas untuk memahami penindasan yang terjadi pada perempuan dalam budaya patriarki. Rosyidin menyatakan bahwa “aliran ini menuding sistem kapitalis sebagai biang keladi penindasan dan represi terhadap kaum perempuan” (Rosyidin, 2020, p. 191). Basis material dari patriarki adalah kendali laki-laki atas ‘tenaga kerja perempuan’. Pembagian kerja berdasarkan gender adalah mekanisme utama di mana masyarakat kapitalis mempertahankan keunggulan laki-laki atas perempuan (Hartmann, 1979, p. 138).

Cynthia Enloe dalam buku *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics* melihat konflik dan militerisme sebagai ‘*personal is international*’ dan ‘*international is personal*’. Pengamatan Enloe tentang hubungan antara internasional dan pribadi berusaha untuk memahami militerisasi politik dan masyarakat dengan memahami tentang politisasi kehidupan sehari-hari dan bahwa proses penelitian dari bawah ke atas, dari kehidupan sehari-hari, memungkinkan untuk mengenali apa yang sering kali tidak terlihat (Enloe, 1990, p. 343). Munculnya kelas yang lebih dominan yang didalamnya terdapat ‘*male supremacy*’ ini diikuti dengan munculnya ‘*standpoint*’ dari kelompok yang termarginal yaitu perempuan (Cockburn, 2015, p. 331-346). Oleh karena itu, strategi pembebasan perempuan dilakukan dengan menggulingkan sistem kapitalis dan menggantinya dengan sistem sosialis (Rosyidin, 2020, p. 191).

Hartsock, Collins, Harding dan Smith yang menekankan bahwa *standpoint* memiliki fokus kepada ‘*Power*’ bahwa ia menantang gagasan tentang “kebenaran esensial” terutama realitas hegemonik yang diciptakan, diwariskan dan dipaksakan oleh mereka yang berkuasa. Perlu ditekankan kembali bahwa tujuan Marxis adalah untuk membuka ruang bagi kaum marginal untuk menentang praktek kekuasaan yang memiliki ‘*view from above*’. Terlebih lagi subjek dari *standpoint* merupakan kelompok yang memiliki kemiripan pengalaman sebagai korban dari praktek kuasa (Cockburn, 2015, p. 331-346). Enloe mengatakan bahwa pandangan feminis yang paling sederhana dan paling mengganggu adalah “*the personal is political*”. Enloe melihat bahwa hubungan yang bersifat pribadi atau sosial ternyata dibumbui oleh ‘*Power*’, dan kekuasaan yang didukung oleh otoritas publik tidak setara (Enloe, 1990, p. 195).

Alasan penulis memilih teori Feminisme *Standpoint* untuk melihat kelas ‘*labour*’ antar gender dalam struktur patriarkis adalah relasi kuasa yang mempengaruhi kedudukan laki-laki dan perempuan sedemikian sehingga perempuan berada pada posisi termarginal. Teori feminisme *standpoint* nantinya akan menjelaskan perjuangan perempuan palestina sebagai bentuk protes terhadap diskriminasi dan perjuangan terhadap kemerdekaan palestina dan kemerdekaan sebagai perempuan.

Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme. Asumsi dasar positivisme adalah determinisme, keyakinan bahwa akibat memiliki sebab dan tindakan yang dapat ditentukan memiliki hasil yang dapat diprediksikan. Post-positivisme mempertahankan asumsi ini dalam bentuk yang dimodifikasi alih-alih menganggap sebab dan akibat adalah proses linier, mereka menganggap hasil sebagai hasil dari serangkaian interaksi kausal yang kompleks (Giddings & Grant, 2006, p. 4). Post-positivisme menganggap bahwa realitas memang bersifat objektif sesuai dengan hukum alam, tetapi tidak sepenuhnya terlihat secara benar oleh manusia (peneliti). Menurut Creswell, metode deskriptif-kualitatif termasuk paradigma penelitian post-positivistik. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian riset untuk meneliti dan mengamati peristiwa yang terjadi dalam situasi sosial. Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif, dimana dengan menggunakan metode ini penelitian berusaha untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana kebijakan Israel berdampak terhadap hak-hak perempuan palestina dengan membandingkan teori, keterangan, dan informasi yang sudah ada. Jangkauan

penelitian ini adalah dari tahun 1987 hingga 1992 pada saat terjadinya gerakan Intifada pertama. Ruang lingkup penelitian periode ini dipilih karena mengaburkan batasan gender yang sebelumnya berbeda dalam masyarakat Palestina, di mana perempuan pertama kali memberikan kontribusi untuk tujuan publik dan menambahkan dimensi baru pada tatanan politik yang mana perempuan memimpin gerakan perjuangan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal yang relevan, artikel dan data-data lain yang telah terdokumentasi. Data-data di dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan *Critical Discourse Analysis* (CDA) untuk mengungkap fenomena tersembunyi di dalam atau di balik wacana/diskursus yang dominan dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

Intifada pertama dimulai pada Desember 1987, ketika sebuah truk militer membunuh warga Palestina di sebuah pos pemeriksaan di Gaza, di mana warga Palestina sedang menunggu izin dari militer Israel untuk memasuki ke Israel untuk bekerja. Intifada Palestina pertama pecah sebagai tanggapan atas pendudukan brutal Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini termasuk berbagai macam strategi yang ditunjukkan untuk menantang pelanggaran Israel terhadap kebebasan dan hak-hak Palestina. Meski spontan, Intifada sebenarnya cukup terorganisir. Pada tahun-tahun sebelum Intifada pertama pecah, perempuan aktif dan terorganisir dalam kelompok perempuan, serikat mahasiswa dan kolektif. Organisasi tersebut secara efektif meletakkan dasar bagi perjuangan terpadu yang muncul dengan pemberontakan kolektif yang dipimpin oleh perempuan, dan menekankan pentingnya pendekatan lintas sektor dalam perjuangan Palestina (Litvin, 2018).

Kebijakan kontrol ruang Israel hampir dengan suara bulat dianggap sebagai penyebab utama. Mereka tidak hanya diidentifikasi secara langsung, tetapi juga secara tidak langsung dengan diperkuat control patriarki (dengan memberikan alasan kepada laki-laki untuk membangun dan melegitimasi pembatasan mereka pada mobilitas perempuan dan aktivisme politik sebagai perlindungan yang diperlukan dari kekerasan spesifik gender dan potensi kekerasan seksual). Intifada benar-benar pemberontakan rakyat. Partisipasi perempuan, anak-anak, dan bahkan orang tua sangat terlihat. Intifada Palestina pertama dianggap sebagai periode dimana aktivisme perempuan Palestina menang. Periode 1987 hingga 1990 menyaksikan peningkatan jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam bingkai perempuan dan organisasi aktivis perempuan.

Partisipasi perempuan dalam intifada pertama ‘membawa visibilitas yang lebih besar kepada Komite Perempuan’. Salah satu narasumber dalam buku *Women and Power: How Women Leaders Negotiates Gaza's Political Reality* juga mengatakan:

“Saya merasa bahwa karena pendudukan Israel dan norma-norma sosial, kami menghadapi tantangan nyata di Palestina. Saya prihatin dengan penderitaan rakyat saya. Setiap hari, orang dibunuh dan ditangkap oleh pendudukan Israel. Saya ingin berpartisipasi dalam pembebasan negara saya. Saya pikir perlu untuk berpartisipasi” (IDI #2) (Jones, Abu-Hamad, & Plank, 2016, p. 21).

Pada tahun 1987 pendudukan ada di mana-mana, dan intifada menyebar di setiap komunitas. Perempuan dan rekan laki-laki mereka berpartisipasi dalam pembangkangan sipil. Perempuan dari semua lapisan masyarakat bergabung dalam perjuangan: perempuan pedesaan yang bekerja keras di lahan, perempuan perkotaan dengan pakaian modern dan mahasiswi yang sebelumnya dipisahkan dari rekan-rekan laki-laki mereka di banyak tempat, semua berpartisipasi dalam pemberontakan melawan Pasukan Pertahanan Israel dengan cara yang berbeda (Sabbagh, 1989, p. 62).

"Di level yang lebih dalam, kita memiliki tujuan yang sama dan misi yang sama" (IDI #2) dan "Jika kita bekerja sama, kita akan menjadi hebat" (IDI #3) (Jones, Abu-Hamad, & Plank, 2016, p. 24).

Tidak semua partisipasi perempuan berbentuk komite formal. Dukungan antusias untuk pemberontakan datang dari perempuan secara terorganisir dan tidak terorganisir, tetapi pada akhirnya didukung oleh jaringan luas lembaga Palestina – termasuk komite dan badan amal wanita. Sementara perempuan di seluruh Palestina berpartisipasi dalam apa yang disebut Penny Johnson dan Eileen Kuttab "’aktivisme ibu’... ketika wanita yang lebih tua melindungi kaum muda dan menentang tentara' (Johnson & Kuttab, 2001, p. 37).

Gerakan perempuan sebagian spontan dan sebagian lagi diorganisir oleh empat komite perempuan, yang bersama-sama membentuk gerakan perempuan modern di wilayah pendudukan. Komite-komite ini semuanya berawal dari Women's Work Committee (WWC), yang dibentuk di bawah naungan Hari Perempuan Internasional 1987 pada 8 Maret, Ketika sebuah kampanye nasional diluncurkan dan kemudian mengubah tindakan mereka bersama dengan siswa sekolah menengah dan mahasiswa untuk memobilisasi orang lain (Hiltermann, 1991, p. 49). Women's Work Committee telah mengembangkan rencana komprehensif yang berfokus pada bidang pendidikan yang merupakan kekuatan terbesar mereka, pengembangan ekonomi rumah tangga, dan pertolongan pertama. Mereka memperpanjang jadwal pusat penitipan anak untuk mengakomodasi perempuan yang aktif dalam pemberontakan. Selain itu, Intifada menyerukan pengembangan lebih lanjut dari serikat pekerja, komite kerja sukarela, komite wanita, dan komite bantuan medis, sebagai perlawanan terhadap pendudukan militer (Hiltermann, 1991, p. 13).

Karena perempuan bekerja lebih efektif di bawah naungan Intifada, akhirnya muncul High Women's Council (HWC) pada Desember 1988, yang menyatukan empat Komite Perempuan. HWC bersatu karena Intifada perlu berkoordinasi sesuai dengan arahan Unified National Leadership of the Uprising (UNLU) (Hiltermann, 1991, p. 198). Mereka mengakui perlunya rencana politik bersama yang menguraikan hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina, Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina dan mengakhiri pendudukan – di luar perbedaan politik mereka. Seperti yang dikatakan Giacaman dan Johnson, perempuan Palestina memperluas peran mereka dalam komunitas daripada menukar identitas atau peran mereka dengan identitas atau peran baru. Dalam hal ini, perempuan dapat mengembangkan kemampuannya di pasar kerja atau operasi terbuka terhadap tentara Israel (Giacaman & Johnson, 1989, p. 156).

Perempuan memainkan peran penting dalam Intifada pertama. Dipahami bahwa pemahaman perempuan berbeda dari laki dan mereka melihat perdamaian dari perspektif relasional dan kemanusiaan. Praktik perempuan terkadang bersifat kekerasan dan melibatkan konfrontasi serius dengan tentara, tetapi sebagian besar perempuan berpartisipasi dalam perlawanan tanpa kekerasan, seperti demonstrasi, protes atau kunjungan ke tahanan politik. Banyak wanita turun ke jalan dan mereka menyelamatkan anak-anak dari penangkapan, baik anak sendiri maupun orang lain. Perempuan berpartisipasi dalam begitu banyak tindakan heroik, hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana perempuan bekerja dalam Intifada pertama. Perlawanan perempuan kepada Israel di praktikkan secara politik (misalnya, berpartisipasi dalam protes dan demonstrasi), secara sosial (misalnya, dengan mendirikan sistem sekolah alternatif informal), dan secara ekonomi (misalnya, dengan, membentuk koperasi pangan dan mengorganisir boikot produk Israel) sesuai dengan seruan UNLU bahwa perempuan telah memainkan peran penting dalam upaya memantau harga yang dikenakan oleh pedagang dan memastikan kepatuhan selama pemogokan komersial dan boikot barang-barang Israel, terutama dalam memberikan pendidikan alternatif bagi anak-anak di rumah, gereja, dan masjid setelah penutupan sekolah.

Perlawanan tanpa kekerasan perempuan juga bersifat ekonomi: perempuan biasanya harus bertindak sebagai pemasok tunggal, dan pekerjaan mereka di komite atau koperasi makanan menjadi dasar untuk memboikot impor Israel. Sebagai manajer keluarga, mereka berdiri di garis depan untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong perempuan lain untuk berhenti membeli produk Israel. Di tingkat sosial, jaringan perempuan, memberikan dukungan kepada tahanan, keluarga mereka, keluarga para martir dan semua sektor atau individu lain yang terkena dampak penindasan Israel selama intifada. Ketika otoritas Israel menutup institusi pendidikan, perempuan menjadi sangat penting dalam membangun sistem pendidikan. Perempuan adalah penggagas *home schooling* untuk anak-anak. Ini adalah bentuk non-kekerasan dengan mendidik anak-anak untuk melawan pendudukan Israel. Mereka pergi dari satu rumah ke rumah lain dengan guru (guru perempuan tentunya). Wanita-wanita ini dan banyak lainnya, melangkah ke posisi kepemimpinan ketika ribuan pria ditangkap, dideportasi atau dibunuh selama pemberontakan oleh Israel (Hankir, 2018).

Pada saat melakukan protes, para perempuan tidak menggunakan senjata, tetapi mereka tetap maju untuk menantang tembakan Israel. Para perempuan Palestina juga percaya bahwa tentara Israel cenderung enggan dalam menembak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, para perempuan Palestina tidak takut untuk berdiri di garis depan dalam memprotes Israel. Selain itu, warga sipil yang tidak bersenjata bukanlah sasaran. Senjata utamanya adalah ekonomi: memboikot barang dan pajak Israel, dan pemogokan komersial. Perempuan juga mendorong dan mendidik anak-anaknya tentang boikot dan untuk tidak membeli produk yang diproduksi di pemukiman karena pemukiman memperpanjang masa pendudukan. Anak-anak mereka menerima pendidikan kesadaran dan ini juga menjadi bagian dari perlawanan perempuan (Helm, 2019). Lama Abu Aqroub, seorang guru dan ibu dari lima anak, dia adalah bagian dari gerakan ini. Ia percaya bahwa peran perempuan sangat penting.

“Jika ada yang bisa mengakhiri konflik ini, itu adalah perempuan. Mereka menempatkan perasaan dan kemanusiaan di atas segalanya. Mereka bisa melawan kekerasan dengan mendidik anak-anak mereka” (Demoulin, 2017)

Selain laki-laki, perempuan Palestina juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi lingkungan, terutama mendorong mereka untuk mengembangkan ekonomi keluarga sendiri dan membantu mengatur persediaan makanan untuk orang lain yang membutuhkan (Johnson & Kuttab, 2001, p. 27). Sebagai satu-satunya upaya yang jelas untuk benar-benar bertindak secara independen selama pemberontakan, Komite Perempuan mulai mendirikan koperasi produksi perempuan untuk mengatasi kekurangan pangan yang disebabkan oleh jam malam militer dan boikot produk Israel. Koperasi memproduksi makanan yang relatif sederhana, seperti jus buah, acar, makanan kaleng dan selai, serta pakaian, bordir, dan bingkai foto untuk pasar lokal. Perempuan bertanggung jawab atas semua tahapan proses produksi dan berbagi keuntungan. Mereka akan menjual barang dagangan mereka melalui kantor Komite Perempuan atau melalui pedagang yang menyetujui pekerjaan Komite.

Koperasi telah mencapai hasil yang positif, mungkin merupakan salah satu pencapaian terpenting dari pemberontakan. Menurut seorang aktivis UPWWC, pendirian koperasi UPWWC di desa Idhna dekat Hebron "membantu menempatkan isu-isu perempuan ke dalam agenda": partisipasi dalam koperasi “meningkatkan kesadaran sosial perempuan. Perempuan menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Ini membantu mereka keluar dari lingkaran keluarga dan membantu mereka dalam situasi keuangan yang buruk, karena laki-laki berada di penjara atau menganggur”. Terlepas dari penolakan kuat terhadap perubahan, isu-isu perempuan telah dimasukkan dalam agenda dan perempuan mulai mendiskusikan status sosial mereka untuk pertama kalinya. Meskipun perempuan selama pemberontakan telah memperbesar atau memperluas peran tradisional mereka daripada mengadopsi peran yang baru, seperti yang ditunjukkan oleh Rita Giacaman dan Penny Johnson, aspek peran ini telah menjadi sumber perlawanan karena perempuan telah mengubah tanggung

jawab keluarga mereka untuk mencakup seluruh komunitas” (Giacaman & Johnson, 1989, p. 161).

Pada tahap awal pemberontakan, Komite Perempuan meminjamkan pengalaman organisasi dan kepemimpinan mereka kepada Komite Rakyat yang muncul di desa-desa, kamp pengungsi, dan lingkungan perkotaan di seluruh wilayah. Setelah serangan tentara Israel, aktivis Komite Perempuan akan mengatur layanan penyelamatan darurat bersama dengan Komite Rakyat setempat, mengunjungi keluarga para martir dan tahanan, dan memberikan materi bantuan bila diperlukan. Mereka akan menghubungi pengacara atas nama tahanan dan keluarga mereka, mengumpulkan pakaian untuk tahanan, dan mengatur kunjungan penjara melalui Palang Merah. Perempuan juga membagikan selebaran, mendiskusikan politik di ruang publik (sering kali untuk pertama kalinya), dan mendesak mereka yang masih belum yakin untuk berpartisipasi dalam pemberontakan (Hiltermann, 1991, p. 50).

“Setiap partai politik memiliki Komite Perempuan. Komite Perempuan dikenal luas karena pekerjaan sosialnya. Tetapi sebenarnya dan secara terselubung itu semua adalah organisasi politik. Pembibitan, menjahit, mengajari wanita merajut, memasak, dll, itu semua adalah *window dressing*, apa yang dilihat orang-orang” - Naima al-sheikh ali. (Bacha, 2017)

Perempuan Palestina juga menghadapi tentara tanpa perlindungan, larut malam, di desa-desa terpencil dan kamp-kamp di mana jam malam diberlakukan, dan membantu mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Misalnya, “ekonomi rumah tangga” memobilisasi masyarakat di seluruh Tepi Barat dengan memaksimalkan penggunaan lahan untuk pertanian untuk mendapatkan kemandirian dan meminimalkan pembelian barang-barang Israel. Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan, Um Khalid, seorang pekerja wanita berusia 48 tahun di sebuah koperasi pertanian di sebuah desa dekat Kota Ramallah, di mana dia bekerja dengan 12 wanita pedesaan, berbicara tentang pekerjaan barunya. Kesadaran diri:

“Saya sekarang merasa mampu memperjuangkan semua hak saya sebagai seorang wanita dan sebagai manusia. Saya bukan lagi ibu rumah tangga. Tidak, saya adalah bagian dari tenaga kerja yang menciptakan perubahan bagi masyarakat saya. Dengan meningkatkan produktivitas, Saya juga bisa menjadi mitra yang lengkap untuk membangun struktur sosial kita” (Sabbagh, 1998, p. 10).

Pada Hari Perempuan 1988, perempuan kelas menengah dengan sepatu hak tinggi, remaja mengenakan celana jins, dan perempuan desa mengenakan pakaian tradisional berbaris di jalan-jalan, kota-kota dan desa-desa Ramallah dan tempat lain seluruh Tepi Barat dan Gaza” (Giacaman & Johnson, 1998, p. 217). Perempuan mengoordinasikan hari pemogokan, membagikan selebaran rahasia yang menguraikan strategi protes mingguan, menjalankan pertanian secara kolektif, dan mengoperasikan sekolah.

“Kami meningkatkan tindakan kami sampai akhir pendudukan. Salah satunya adalah dengan memboikot produk Israel. Siapa yang akan memimpin dalam menemukan produk alternatif? Gerakan Perempuan” – Azza Oase (Bacha, 2017).

Misalnya, Naila Ayesh adalah salah satu pendiri kepemimpinan persatuan Intifada. Dia menyusun dan mendistribusikan komunike yang menguraikan dan menerapkan berbagai kegiatan politik, mulai dari pemogokan, boikot hingga demonstrasi (Hankir, Middle East Eye, 2018). Dalam beberapa kasus, mereka memegang posisi tertinggi di partai politik yang sangat patriarki. Mengingat peran perempuan dalam berorganisasi selama Intifada Pertama, Ayesh menjelaskan,

“Kami dapat membagikan selebaran bahkan saat jam malam, kami dapat bergerak lebih mudah daripada laki-laki” - Naila Ayesh.

Kamal menambahkan,

“Biasanya ketika kami berbicara tentang Intifada pertama, kami mengatakan bahwa itu adalah gerakan yang komprehensif, karena orang-orang dari berbagai usia dan gender

berpartisipasi. Tetapi pada saat yang sama, perempuan sejak awal adalah bagian dari Intifada seperti yang dikatakan Naila sebelumnya: dari mentalitas patriarki penjajah, mereka berpikir bahwa perempuan ada di rumah, bahwa mereka tidak melakukan hal seperti ini, jadi Israel membiarkan mereka lewat jika itu adalah wanita berpakaian bagus atau semacamnya, Israel pikir mereka tidak ada hubungannya dengan perlawanan. Lalu, ketika banyak laki-laki ditangkap, perempuan masuk ke dalam kepemimpinan gerakan” (Zimmerman, 2017)¹.

Meskipun sebagian besar gerakan perlawanan dilakukan dengan tanpa kekerasan, perempuan juga memainkan peran yang sangat berani seperti laki-laki untuk melawan tentara Israel. Khususnya selama tahap awal konflik pada tahun 1987 dan awal 1988, perempuan berperang melawan tentara Israel dan terkadang ditangkap, diinterogasi dan terluka oleh tembakan (Kuttab, 1993, p. 69). Komite-komite perempuan selama Intifada terlibat dalam taktik politik dan publik seperti “melempar batu, membakar ban, mengangkut dan menyiapkan batu, dan membangun penghalang jalan”. Pada hari-hari awal pemberontakan di wilayah-wilayah pendudukan, perempuan Palestina berbaris di jalan-jalan, siswa perempuan melemparkan batu ke tentara, dan wanita tua membawa keranjang batu di kepala mereka untuk memasok demonstran muda. Perempuan juga melindungi anak-anak dari tentara. Pada tahun 1988 wanita Palestina dengan status sosial dan biologis mereka sebagai ibu, juga melakukan konfrontasi kepada IDF yang bertanggung jawab atas penangkapan dan penganiayaan pemuda Palestina. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa perempuan memberontak terhadap peran sosial tradisional mereka yang telah ditentukan sebelumnya (Jad, 1990, p. 133). Misalnya, sampel besar remaja dan gadis Palestina, menunjukkan bahwa selama Intifada, 50% hingga 65% perempuan muda yang tinggal di Gaza dan Tepi Barat secara terbuka berdemonstrasi dan memprotes pemerintah militer Israel (Barber, 2001, p. 259). Menurut seorang aktivis di desa Kufr Na'meh (Ramallah), fakta bahwa perempuan berpartisipasi dalam demonstrasi dan konfrontasi dengan tentara, terluka atau terbunuh. Fakta bahwa mereka pergi ke kota untuk menjual produk di pasar, mengunjungi kerabat di tahanan, dan mengikuti acara politik di Ramallah atau Yerusalem telah mengubah posisi mereka secara keseluruhan (Hiltermann, 1991, p. 53).

Orang-orang Palestina mengakui bahwa pembangkangan sipil massal adalah kekuatan terbesar dalam perang melawan Israel. “Boikot barang-barang Israel, menolak membayar pajak, mendirikan klinik keliling sendiri, menyediakan layanan sosial, mengatur pemogokan dan demonstrasi, bahkan konfrontasi” mengejutkan pendudukan. Bahkan setelah disiksa oleh pendudukan dengan dipukul, dipenjara, ancaman seksual, dan pemerkosaan, perempuan Palestina terus menentang otoritas pendudukan (Karkar, 2007).

Bagi perempuan Palestina, perjuangan pembebasan perempuan telah terikat dengan perjuangan nasional Palestina untuk kemerdekaan. Melalui gerakan nasional, perempuan Palestina dapat memasuki ruang publik dengan relatif mudah. Bahkan, Intifada pertama memungkinkan perempuan untuk mengambil peran dan tanggung jawab yang biasanya dipegang oleh laki-laki. Dengan terbebasnya Palestina dari kekuasaan Israel, perempuan Palestina bisa mendapatkan kembali hak-hak yang selama ini dirampas karena adanya konflik yang terus berlanjut di Gaza. Para pejuang hak-hak perempuan di palestina mengatakan bahwa, jika perempuan ingin babas dan meningkatkan status mereka di masyarakat, mereka harus memenuhi prasyarat negara demokratis dan sekuler. Perempuan memimpin perlawanan pertama kalinya, memberikan tekanan ekonomi dan internasional yang nyata pada Israel untuk bernegosiasi (Women, War & Peace, 2019).

¹ Wawancara dengan Naila Ayesh, Zahira Kamal, Julia Bacha dan Suhad Babaa oleh Amy Zimmerman di Upper West Side New York. Pengalaman yang diceritakan Kamal dan Ayesh—teknik mereka menghadapi interogasi Israel, bagaimana menghindari jam malam selama pemberontakan (Zimmerman, 2017).

Feminisme *standpoint* melihat dunia dari kaca mata pengalaman perempuan yang pada kasus ini yaitu Intifada pertama. Intifada yang dimulai pada tahun 1987 mengaburkan batas-batas gender yang sebelumnya jelas dalam masyarakat Palestina dan merupakan puncak bagi kaum feminisme Palestina yang turun ke jalan berdampingan dengan laki-laki untuk memprotes kedudukan Israel. Intifada menggambarkan gerakan modern yang menyatakan protes terhadap dominasi laki-laki dan perempuan Palestina berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Jika perempuan menggunakan tubuh mereka untuk membela tanah air, komunitas dan keluarga mereka, dan sering membangun jembatan 'nyata' dalam protes anti-pendudukan dengan aktivis Israel, maka protes mereka juga akan berdampak pada hubungan sosial gender. Ini bukan tentang memutuskan pengalaman perempuan dari perjuangan politik, tapi tentang mempromosikan emansipasi perempuan Palestina dalam konteks perjuangan kolektif untuk pembebasan Palestina. Seperti yang dikatakan J. Ann Tickner, perempuan mencari cara untuk menghentikan status subordinat mereka (Tickner J. A., 2001, p. 25). Proses melawan pendudukan kolonial membentuk kesadaran kelas dan gender yang secara sistematis mempengaruhi agenda perempuan dan perjuangan mereka untuk hak-hak mereka (Hudson, 1994, p. 125). Strategi pembebasan perempuan ini dilakukan dengan menggulingkan sistem kapitalis dan menggantinya dengan sistem nasionalis (Rosyidin, 2020, p. 191).

Perkembangan asosiasi feminis sangat progresif menjelang akhir Intifada dan beberapa aktivis menyatakan keinginan mereka untuk menggunakan kesempatan yang diberikan oleh mobilisasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini untuk mempromosikan pembebasan perempuan. Disepakati bahwa perempuan Palestina telah mulai bekerja untuk pembebasan mereka sendiri dengan berpartisipasi dalam perlawanan rakyat mereka (Giacaman & Johnson, 1989, p. 155). Karena adanya '*male supremacy*' dan munculnya *standpoint* perempuan, dalam banyak kasus perempuan telah mengambil peran perjuangan dan mendapat dukungan yang tidak diberikan kepada mereka di masa lalu (Cockburn, 2015, p. 11). Beberapa wanita mengangkat senjata melawan tentara Israel, sementara yang lain melakukan piket dan memprotes. Karenanya, banyak wanita mengalami perluasan kebebasan sipil berdasarkan gender (Gluck, 1995, p. 15). Sebuah studi menemukan bahwa gerakan yang memasukkan kesetaraan gender dan semakin tinggi tingkat partisipasi perempuan dalam gerakan perlawanan non-kekerasan, semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perempuan Palestina juga terlibat dalam usaha-usaha kecil yang disebut *Sumūd* yang diterjemahkan sebagai keteguhan, dapat digambarkan sebagai bentuk perlawanan sehari-hari (tanpa kekerasan) yang terselubung, seringkali individual dan tidak terorganisir (Scott, 1997). Tindakan ini jelas tidak dapat mengubah pendudukan Israel secara permanen namun untuk menggulingkan struktur kekuasaan/*power* yang ada. Manfaat dari kebebasan bergerak ini bersifat sementara dan pribadi. Mengambil konsep yang menjelaskan bagaimana feminis memandang *Power* dalam buku *The Feminist View of Power* oleh Amy Allen, perempuan Palestina memandang *Power* adalah untuk menentang gagasan tentang "kebenaran esensial". Mereka memandang *Power as Domination* karena digunakan untuk mendominasi kekuatan Israel (Allen, 2005, p. 19). De Certeau menulis "[i]n these combatants' stratagems, there is a certain art of placing one's blows, a pleasure in getting around the rules of a constraining space". (de Certeau, 1984, p. 18). Perempuan palestina telah menunjukkan bahwa perlawanan tidak harus berupa kekerasan, juga tidak harus terbuka dan kolektif. Mereka tidak hanya dirampas hak-hak sosial, politik dan sipilnya, tetapi mereka juga dirampas haknya untuk menikmati hak-hak mereka, tempat untuk mengklaim hak-hak mereka, desakan perempuan Palestina atas hak mereka untuk hidup normal dan bahagia adalah cara bagi mereka untuk mendapatkan kembali kemanusiaan mereka.

Ketika gerakan feminis muncul, perempuan dihadapkan pada pilihan sulit, apakah menempatkan kepentingannya sendiri sebagai perempuan di atas kepentingan nasional, atau mencoba menemukan cara untuk mendamaikan ideologi yang tampaknya bersaing. Dari

rekonsiliasi ini, lahirlah Nasionalisme Feminis. Selama pemberontakan, perempuan elit Palestina mengadopsi metode ini dengan keinginan untuk mencapai pembebasan nasional dan gender. Sebagaimana disebutkan di atas, nasionalisme dan feminisme tidak serta merta bertentangan. Peteet menjelaskan, "jika nasionalisme dan feminisme disandingkan sebagai bidang kepentingan, identitas, dan persaingan local masyarakat menghadapi resiko struktur ganda yang tidak terlihat dalam pengalaman sehari-hari" (Massad, 1995, p. 470).

Perempuan Palestina juga menantang konstruksi sosial gender. Mereka menggunakan tubuh mereka sebagai tempat untuk partisipasi politik perempuan sering melakukan bentuk-bentuk gerakan non-kekerasan yang spesifik gender. Tindakan perlawanan perempuan dengan demikian tidak hanya menantang budaya politik hierarkis yang didominasi laki-laki, tetapi juga melancarkan serangan yang kuat terhadap norma-norma gender yang mendefinisikan dan membatasi partisipasi politik. Dengan membela negara, tanah air, masyarakat, keluarga dan juga laki-laki perempuan telah menumbangkan oposisi biner gender tradisional antara perempuan yang dilindungi dan laki-laki yang melindungi. Dalam melakukannya, perempuan berjuang melawan cara-cara politik yang ditentukan dan dikendalikan oleh laki-laki, dan bentuk-bentuk kekuasaan yang diwujudkan oleh laki-laki dan subyek politik perempuan (Featherstone, 1992, p. 165).

Slogan 'pribadi adalah politik' dan 'politik adalah pribadi' dalam buku *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, Cynthia Enloe mengatakan '*personal is International*' dan '*International is Personal*' (Enloe, 1990. P, 343). Pengalaman mereka di bawah pendudukan telah mengajarkan mereka bahwa patriarki, kelas dan pendudukan tidak dapat dipisahkan dan saling memperkuat sumber penindasan perempuan. Menafsirkan slogan feminis 'pribadi adalah politik' dari pendekatan struktural dan lintas sektoral seperti itu berarti tidak hanya berarti bahwa mereka harus menghadapi berbagai sumber kekuasaan politik, sosial dan budaya bersama-sama, tetapi juga yang lebih penting menentanginya, perjuangan melawan penindasan politik, yaitu pekerjaan, harus diprioritaskan. Mengakhiri pendudukan Israel dan eksploitasi Israel terhadap ekonomi Palestina merupakan prasyarat bagi pemberdayaan perempuan.

Feminis Palestina menganggap perjuangan nasional sebagai medan yang diperlukan untuk merundingkan hak-hak perempuan dan menghubungkan kembali feminisme dengan tujuan nasional. Hal ini memberikan contoh yang dapat diikuti oleh perjuangan berbasis kelas dan gender untuk memajukan perjuangan sosial atau ekonomi melawan struktur yang menindas sambil menghubungkannya dengan gerakan nasional. *One of the central lessons from this period, and one of the issues that movements like the women's movement are struggling with today, is the need to re-link the now severed ties between feminist, class based struggles and the national liberation struggle* (Hammani & Kuttub, 1999, p. 15). Untuk memastikan pemberdayaan perempuan lebih lanjut, perlu adanya peraturan dan hak yang nyata, jika perubahan ingin dipertahankan.

KESIMPULAN

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina berdampak besar bagi hak-hak perempuan Palestina. Pihak Israel memberlakukan pembatasan pergerakan bebas di pos pemeriksaan dan *curfew*, pembatasan permohonan reunifikasi keluarga, pembongkaran dan pengungsian rumah, penggunaan kekuatan yang berlebihan, dan penyiksaan dan penganiayaan selama interogasi terhadap perempuan. Tindakan deskriminatif yang dilakukan tentara Israel menyebabkan kerusakan fisik, seksual, psikologis, emosional, dan kehilangan martabat dan rasa hormat yang serius. Dengan demikian, perempuan Palestina mulai melakukan gerakan untuk melawan tentara Israel.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, peneliti berhasil memperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang ada dengan menggunakan Teori Feminisme *Standpoint*. Perjuangan perempuan Palestina, pada Intifada pertama (1987-1992) terbagi menjadi dua bentuk, *Non-Violence Resistance* dan *Violence Resistance*. Intifada menggambarkan gerakan modern yang menyatakan protes terhadap dominasi laki-laki dan perempuan Palestina berupaya untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Selama pemberontakan, kerja sama perempuan dengan laki-laki telah membangkitkan minat besar dalam isu-isu yang mempengaruhi perempuan, seperti kesetaraan gender. Perempuan Palestina terlibat dalam berbagai hal seperti turun ke jalan untuk mengatur pemogokan dan demonstrasi bahkan konfrontasi, mengambil posisi kepemimpinan di komite lokal, boikot barang-barang Israel, menolak membayar, pajak dan mengirimkan amunisi. Perempuan juga menjadi koordinator untuk memecahkan masalah yang ada seperti kekurangan bahan pokok karena boikot dan mendirikan klinik keliling sendiri menyediakan layanan sosial contohnya menyediakan sekolah alternatif bagi anak-anak. Perempuan memainkan peran penting dalam konflik Israel-Palestina dalam mencapai perdamaian yang diinginkan.

Perkembangan feminis sangat progresif menjelang akhir Intifada dan perempuan menyatakan keinginan mereka untuk mempromosikan kebebasan perempuan. Kemunculan *standpoint* dari kelompok yang termarginal yaitu perempuan mengakibatkan banyak perempuan mengalami perluasan kebebasan sipil berdasarkan gender. Selama pemberontakan, perempuan elit palestina mengadopsi metode nasionalisme feminis dengan keinginan untuk mencapai pembebasan nasional dan gender. Perlawanan yang dilakukan perempuan adalah untuk melawan ketidakadilan, untuk hidup, berjuang dan bertahan dalam konteks pendudukan yang berkepanjangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa munculnya gerakan perlawanan dari perempuan Palestina merupakan sebuah reaksi dari permasalahan yang terjadi. Perempuan palestina memiliki pandangan bahwa dengan terbebasnya Palestina dari kekuasaan Israel, perempuan Palestina bisa mendapatkan kembali hak-hak yang selama ini dirampas. Perlawanan ini sejalan dengan teori feminisme *standpoint* yaitu munculnya kelas yang lebih dominan, diikuti dengan munculnya '*standpoint*' dari kelompok yang termarginal yaitu perempuan untuk melihat kebenaran dari pengalaman mereka dengan keinginan untuk merubah atau memperbaiki keadaan agar perempuan semakin terlihat demi mencapai kesetaraan gender yang dalam Hubungan Internasional gender merupakan perspektif yang digunakan dalam setiap pengambilan kebijakan. Perspektif feminisme *standpoint* dapat dibidang cocok digunakan dalam penelitian ini karena *standpoint* melihat dunia dari kaca mata pengalaman perempuan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan masalah yang dihadapi oleh perempuan Palestina akibat kependudukan Israel atas Palestina, karena negara belum memusatkan perhatian kepada masyarakat dan isu *low politic* masih dipandang sebelah mata oleh karena itu isu perempuan masih dikesampingkan. Gerakan populer di masa lalu mengingatkan perjuangan nasional dengan program pembebasan sosial dan mendasarkan kesadaran nasional dengan hubungan sosial yang setara dan untuk melakukan pemenuhan HAM di masyarakat.

Adapun rekomendasi dalam melihat partisipasi perempuan secara penuh yakni untuk membahas keterlibatan perempuan dalam proses resolusi konflik. Apakah ada peraturan dan hak yang nyata untuk memastikan pemberdayaan perempuan bahwa mereka dilindungi dalam konflik Israel – Palestina dan terpenting apakah keterlibatan perempuan dalam perjanjian perdamaian agar perubahan yang diinginkan dapat dipertahankan.

REFERENSI

- Aaliyah, C. (2017, Februari 27). *Israel has Demolished 48,000 Palestinian Homes Since 1967*. Retrieved from <https://www.welcometopalestine.com/article/israeli-demolitions-palestinian-homes/>
- Allen, A. (2005, Oktober 19). *Feminist Perspectives on Power*. Retrieved from Stanford Encyclopedia of Philosophy: <https://plato.stanford.edu/entries/feminist-power/>
- Amnesty International. (2005). *Israel: Conflict, occupation and patriarchy: Women carry the burden*. 3.
- Bacha, J. (Director). (2017). *Naila and the Uprising* [Motion Picture].
- Barber, B. K. (2001). Political Violence, Social Integration, and Youth Functioning: Palestinian Youth from the Intifada. *Journal of Community Psychology*, 259.
- Cockburn, C. (2015). *Marxism and Feminism: Standpoint Theory; Chapter 15 of Mojab, Shahrzad (ed)*. London: Zed Books. 331-346.
- de Certeau, M. (1984). *The Practice of Everyday Life*. Berkeley, Los Angeles: University of California Press. 18.
- Enloe, C. (1990). *Banana, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley dan Los Angeles: University of California Press. 81.
- Demoulin, C. (2017, Desember 28). *Reviving Palestinian Non-Violence Resistance*. Retrieved from Equal Times: <https://www.equaltimes.org/reviving-palestinian-non-violent?lang=en#.YUYG4rhKjIV>
- Enloe, C. (1990). *Banana, Beaches, and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*. Berkeley dan Los Angeles: The University of California Press. 195, 343.
- Featherstone, M. (1992). *The Heroic Life and Everyday Life*. London: Sage Publications. 165.
- Giacaman, R., & Johnson, P. (1989). *Palestinian Women: Building Barricades and Breaking Barriers*. Boston: Southend Press. 155-156.
- Giacaman, R., & Johnson, P. (1989). *Palestinian Women: Building Barricades and Breaking Barriers*. In Z. Lochman, & B. Joel, *Intifada: The Palestinian Uprising Against Israeli Occupation* (p. 161). Boston: South End Press.
- Giacaman, R., & Johnson, P. (1998). *Intifada Year Four: Notes on the Women's Movement*. In S. Sabbagh, *Palestinian Women of Gaza and the West Bank* (p. 217). Bloomington: Indiana University Press.
- Giddings, L. S., & Grant, B. M. (2006). *Mixed Methods Research for the Novice Researcher Vol. 23. Content Management Pty Ltd*, 4.
- Ginbar, Y. (2003). "Back to a Routine of Torture, Torture and Ill-Treatment of Palestinian Detainees during Arrest, Detention and Interrogation. Jerusalem: Public Committee Against Torture in Israel. 88.
- Gluck, S. B. (1995). *Palestinian Women: Gender Politics and Nationalism*. *Journal of Palestine Studies*, 15.
- Griffin, E. A. (1991). *A First Look at Communication Theory*. New York: McGraw-Hill Companies, Inc, 471.
- Hammani, R., & Kuttab, E. (1999). *The Palestinian Women's Movement: Strategies Towards Freedom and Democracy*. *News From Within*, 15.
- Hankir, Z. (2018, Maret 15). *'My Story is One of Many' : The Palestinian Women Behind the First Intifada*. Retrieved from Middle East Eye:

- <https://www.middleeasteye.net/features/my-story-one-many-palestinian-women-behind-first-intifada>
- Haraway, D. (1988). *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Feminist Studies*. 575.
- Harding, S. (2004). *The Feminist Standpoint Theory Reader: Intellectual and Political Controversies*. New York and London: Routledge, 1.
- Hartmann, H. (1979). *Capitalism, Patriarchy, and Job Segregation by Sex*. New York and London: The University of Chicago Press. 138.
- Helm, S. (2019, April 21). *Women on Front Line in thr Deadly No-Man's Land of Gaza's Buffer Zone*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/women-protest-gaza-great-eturn-march-palestine-ahed-tamimi-a8316256.html>
- Hiltermann, J. R. (1991). *Behind the Intifada: Labor and Women's Movement in the Occupied Territories*. Princeton: Princeton University Press. 13, 198.
- Hiltermann, J. R. (1991). *The Women's Movement During the Uprising*. *Journal of Palestine Studies*, 49-53.
- Hudson, L. (1994). *Coming of Age in Occupied Palestine: Engendering the Intifada*. In F. M. Göcek, & S. Balaghi, *Reconstruction Gender in the Middle East: Tradition, Identity, and Power* (p. 125). New York: Columbia University Press.
- Jad, I. (1990). *From Salons to Popular Committees: Palestinian Women, 1919-1989*. In J. Nassar, & R. Heacock, *Palestine at the Crossroads* (p. 133). New York: Praeger Publisher.
- Johnson, P., & Kuttab, E. (2001). *Where Have All the Women (and Men) Gone? Reflections on Gender and the Second Palestinian Intifada*. *Feminist Review*, 27-37.
- Jones, N., Abu-Hamad, B., & Plank, G. (2016). *Women and Power: How Women Leaders Negotiate Gaza's Political Reality*. *Overseas Development Institute*, 24.
- Karkar, S. (2007, Desember 10). *The Fist Intifada 20 Years Later*. Retrieved from The Electronic Intifada: <https://electronicintifada.net/content/first-intifada-20-years-later/7251>
- Kuttab, E. (1993). *Palestinian Women in the Intifasa: Fighting on Two Fronts*. *Arab Studies Quarterly*, 69.
- Litvin, Y. (2018, Juli 14). *New Film Highlights Women's Role in the First Palestinian Intifada*. Retrieved from Truthout: <https://truthout.org/articles/new-film-highlights-womens-role-in-the-first-palestinian-intifada/>
- Massad, J. (1995). *Conceiving the Masculine: Gender and Palestinian Nasionalism*. *Middle East Journal*, 470.
- MIFTAH. (2017, Juli 13). Retrieved Oktober 8, 2020, from Family Reunification: <http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=14464&CategoryId=4>
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 191-201.
- Sabbagh, S. (1998). *Palestinian Women of Gaza and The West Bank*. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press. 10.
- Sabbagh, S. (1989). *Palestinian Women Writers and the Intifada*. *Social Text*, 62.
- Scott, J. (1997). 'The Infrapolitics of Subordinate Groups'. In M. Rahnema, & V. Bawtree, *The Post Development Reader*. London and New Jersey: Zed Books.
- Tickner, J. A. (2001). *Gendering World Politics: Issues And Approaches in the Post-Cold War Era*. New York: Columbia University Press. 17-25.
- United Nations Development. (2014, Juli 7). *Assistance to the Palestinian people: Developments*. Retrieved Desember 7, 2019, from United Nations: https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/tdb61d3_en.pdf

- Women, War & Peace. (2019, Maret 22). *Public Broadcasting Service*. Retrieved from PBS: <https://www.pbs.org/wnet/women-war-and-peace/uncategorized/what-you-need-to-know-about-the-1987-intifada/#:~:text=While%20the%20First%20Intifada%20is,pressure%20on%20Israel%20to%20negotiate>
- Zimmerman, A. (2017, November 28). *The Radical Women at the Heart of Palestine's First Intifada*. Retrieved from The Daily Beast: <https://www.thedailybeast.com/the-radical-women-at-the-heart-of-palestines-first-intifada>